

Media Komunikasi dan Inspirasi

JENDELA

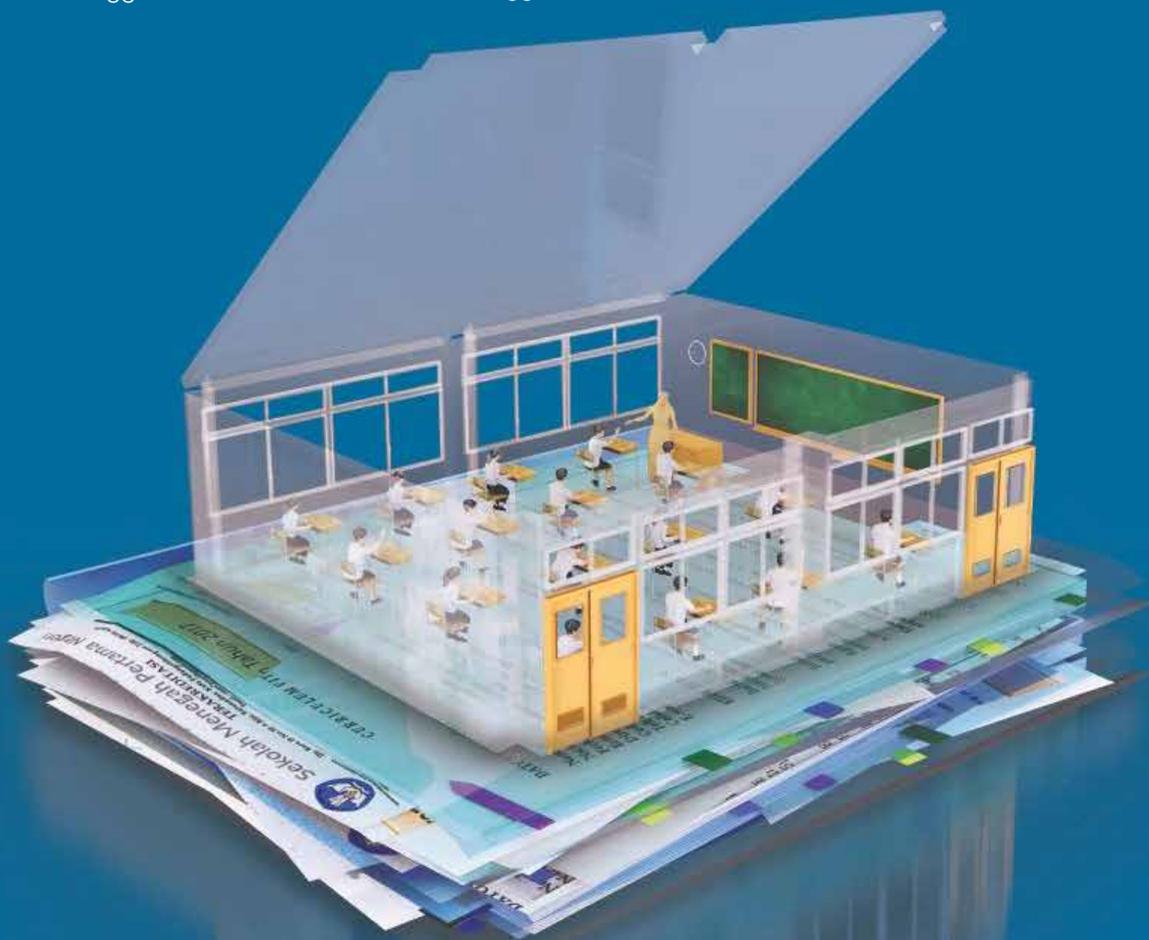
Pendidikan dan Kebudayaan

XXXVII/Oktober - 2019

06 | Zona Integritas
Bebas dari Korupsi
Hingga ke Sekolah

10 | SIPLah, Platform Elektronik
untuk Transparansi
Penggunaan Dana BOS

13 | Bersama-sama Mari
Kawal Penggunaan
Dana BOS



Wujudkan Transparansi dan Akuntabilitas di Sekolah

PERAIH PENGHARGAAN EMAS
SAMPUL TERBAIK KATEGORI
E-MAGAZINE GOVERNMENT SPS



INDONESIA INHOUSE MAGAZINE
AWARDS 2018 DAN 2019

JUARA KETIGA
ICMA 2018
KATEGORI
GOVERNMENT INSTITUTION



INDONESIA CONTENT
MARKETING AWARDS

Daftar Isi

Fokus

7

Pengelolaan Keuangan di Sekolah
**Wujudkan Sekolah yang
Transparan dan Akuntabel**

16

Peran Komite Sekolah
**Perlu Awasi Penggunaan
Dana BOS di Sekolah**

18

Penguatan Tata Kelola
Pendidikan Melalui Sistem
Pengadaan Daring

20

Bentuk Karakter
"Antikorupsi"
pada Diri Siswa dan Guru

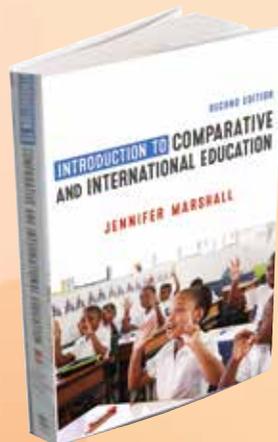
22

Sekolah "Bersih",
Generasi Berintegritas,
Indonesia Berkarakter!

Resensi Buku

24

Pengaruh
Globalisasi
dalam
Pendidikan
Internasional



Kebudayaan

26

Pekan Kebudayaan
Nasional 2019
**Ruang Keberagaman
Ekspresi Budaya
Tradisional
Hingga Modern**

Kajian

30

Pengaruh PISA
dalam Perubahan
Kurikulum Pendidikan
Indonesia

Bangga Berbahasa Indonesia

33

Diftong dan Kluster
Bahasa Indonesia

34

Senarai
Kata Serapan

Sapa Redaksi

GOOD governance adalah istilah subyektif yang menggambarkan bagaimana lembaga publik melakukan urusan publik dan mengelola sumber daya dengan cara yang dipilih. Dengan *Good governance*, kekuasaan tidak semata-mata dimiliki dan menjadi urusan pemerintah saja, melainkan juga secara bersama-sama dikelola oleh masyarakat dan pihak swasta.

Good governance memiliki beberapa prinsip di antaranya yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil, sedangkan akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan segala tindakan dan kebijakan yang dilakukan. Prinsip ini tidak hanya harus dimiliki oleh lembaga pemerintahan, tapi juga lembaga publik lainnya, termasuk sekolah.

Majalah JENDELA edisi kali ini menjelaskan tentang upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di sekolah yang disajikan sebanyak 17 halaman pada rubrik **Fokus**. Melalui rubrik ini, JENDELA mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk di lingkungan satuan pendidikan untuk terus menjaga transparansi dan akuntabilitas di sekolah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sementara itu pada rubrik **Resensi Buku** kali ini redaksi mengulas buku *Introduction to Comparative and International Education* yang ditulis oleh Jennifer Marshall. Buku ini

membahas tentang tema-tema utama pendidikan dan globalisasi. Pada rubrik selanjutnya, yaitu rubrik **Kebudayaan**, JENDELA mengupas lebih dalam lagi mengenai kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) yang bertemakan “#IndonesiaBahagia”. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda besar Kemendikbud pada tahun 2019 yang menjadi tempat bertemu dan berinteraksi bersama antarmasyarakat dari berbagai unsur kebudayaan.

Pada rubrik **Kajian**, ada suguhan hasil kajian tentang pengaruh PISA dalam perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kajian ini ditulis oleh Indah Pratiwi dari Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud yang redaksi tulis ulang dalam bentuk tulisan populer. Sajian ini dapat pembaca nikmati pada halaman 30 hingga 32.

Seperti biasa, JENDELA hadirkan rubrik **Bangga Berbahasa Indonesia** sebagai sajian penutup. Rubrik **Bangga Berbahasa Indonesia** kali ini mengulas tentang diftong dan kluster bahasa Indonesia. Pembahasan lengkapnya dapat pembaca simak pada halaman 33. Sementara pada halaman 34, redaksi suguhkan daftar kata-kata serapan bersama arti dan asal kata serta negaranya.

Akhir kata kami ucapkan semoga JENDELA edisi kali ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan pembaca. Selamat membaca. Salam.

Redaksi

REDAKSI

Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
Muhadjir Effendy

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbud, Soeparto

Penanggung Jawab: Ade Erlangga Masdiana

Pemimpin Redaksi: Anang Ristanto

Redaktur Pelaksana: Ratih Anbarini

Staf Redaksi: Agi Bahari, Desliana Maulipaksi, Ryka Hapsari Putri, Dwi Retnawati, Denty Anugrahmawaty, Prima Sari, Anang Kusuma, Prani Pramudita, Dennis Sugianto, Intan Indriaswanti, Nur Widiyanto

Editor: Zainuddin, Sigit Supriyadi, M. Adang Syaripudin, Heri Nana Kurnia

Fotografi, Desain & Artistik: BKLM

Sekretariat Redaksi

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



-  kemdikbud.go.id
-  Kemdikbud.RI
-  @kemdikbud_RI
-  KEMENDIKBUD RI
-  Kemdikbud.RI
-  jendela.kemdikbud.go.id

Salam Pak Menteri

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah bertekad untuk menjadi kementerian yang memiliki zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK). Tidak cukup hanya di lingkup kementerian, satuan pendidikan yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat juga didorong untuk menerapkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, serta akuntabel. Hal ini karena pengelolaan dana BOS menjadi sepenuhnya kewenangan sekolah.

Dana BOS disalurkan untuk membantu membiayai operasional sekolah untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Penggunaan dana BOS yang sesuai dan tepat sasaran akan sangat membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kita berharap pendidikan yang berkualitas dapat mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itulah mengapa pengelolaan dana BOS perlu diawasi penggunaannya, sehingga yang menjadi hak peserta didik memang benar-benar dapat diterima dengan baik.

Ikhtiar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk meningkatkan tata kelola keuangan yang baik di satuan pendidikan adalah dengan mengembangkan sistem daring yang memudahkan sekolah untuk melakukan pembelian sarana sekolah. Dengan menggunakan sistem yang diberi nama Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah

(SIPLah), seluruh dokumen transaksi terekam, sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Sistem tersebut dikembangkan bukan tanpa alasan. Sebelumnya sekolah kerap disibukkan dengan urusan administrasi pelaporan yang kerap menyita waktu. Padahal satuan pendidikan semestinya dapat lebih banyak mencari cara paling efektif untuk peningkatan kualitas



belajar mengajar, termasuk manajemen pembelajaran. Dengan sistem tersebut, kita berharap, urusan administrasi menjadi cenderung lebih mudah.

Di sisi lain, pengawasan penggunaan anggaran BOS juga sebaiknya ditingkatkan. Ini bisa dilakukan lewat peran serta komite sekolah dan masyarakat. Pengawasan bersama akan membantu sekolah dalam memanfaatkan dana BOS dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan operasional sekolah.

Tentu yang kita harapkan bersama adalah keberlangsungan pendidikan anak-anak kita dapat terus terjamin dan tidak ada kendala yang dapat menghentikan kegiatan pembelajaran di sekolah. Inovasi dan perbaikan terhadap penyaluran dan pengawasan anggaran BOS senantiasa dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi sekolah dalam pengelolaannya. Dengan demikian maka siswa dan orangtua pula yang mendapatkan manfaatnya. Semoga. (*)

Luaskan Semangat Zona Integritas Bebas dari Korupsi Hingga ke Sekolah

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkomitmen penuh dalam mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Komitmen itu tidak hanya ditujukan bagi unit kerja di bawah Kemendikbud, tetapi menyebarkan semangat itu hingga ke satuan pendidikan. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan sekolah yang transparan dan akuntabel.

SALAH SATU upaya yang dilakukan Kemendikbud untuk mewujudkan zona integritas yaitu dengan memperkuat tata kelola keuangan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dalam taklimat Tata Kelola Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 pada Januari 2019 lalu menjelaskan, usaha untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan korupsi harus selalu dibudayakan. “Berbagai cara telah kita lakukan seperti melakukan reformasi birokrasi, melakukan perbaikan sistem dan tata kelola agar dapat melayani dengan lebih baik. Juga membangun zona-zona integritas,” tutur Mendikbud.

Penguatan tata kelola keuangan untuk satuan pendidikan adalah melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Aplikasi ini diluncurkan sebagai salah satu bentuk komitmen Kemendikbud dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel. SIPLah bertujuan untuk mendukung pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sekolah yang dananya bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. BOS Reguler merupakan program Pemerintah Pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, PBJ di sekolah dapat dilaksanakan

secara daring atau luring. Kemendikbud lalu merancang SIPLah untuk digunakan dalam PBJ sekolah yang dilakukan secara daring. Aplikasi ini memungkinkan sekolah untuk tidak lagi direpotkan dengan dokumen administratif fisik karena semua data pembelian terekam dalam sistem SIPLah.

Selain SIPLah, bentuk perwujudan ZI-WBK yang dilakukan Kemendikbud di lingkungan sekolah adalah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelenggarakan program edukasi antikorupsi bagi warga sekolah di jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai pendidikan menengah, yaitu “Saya Anak Antikorupsi” (SAAK) dan “Saya Guru Antikorupsi” (SGAK). Program edukasi ini dilaksanakan langsung di sekolah-sekolah dan membentuk agen-agen di daerah.

Pada kegiatan ini Inspektur Jenderal Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin mengemukakan bahwa program SAAK merupakan salah satu program Penguatan Pendidikan Karakter dengan membangun budaya antikorupsi, khususnya di lingkungan satuan pendidikan. “Kemendikbud bersamasama dengan KPK mulai memasyarakatkan secara massal, terutama dibantu oleh para siswa, guru, dan tenaga kependidikan untuk bersamasama membangun budaya antikorupsi di satuan pendidikan,” jelas Muchlis, pada peluncuran program SAAK, yang dihadiri 720 siswa SMA dan SMK, Maret 2019 lalu. **(INT)**

Pengelolaan Keuangan di Sekolah

Wujudkan Sekolah yang Transparan dan Akuntabel

Sebagai satuan pendidikan yang mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, sekolah didorong untuk selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan dana BOS itu meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Keseluruhan kegiatan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar.

BANTUAN OPERASIONAL Sekolah (BOS) digulirkan pertama kali pada 2005. Saat itu BOS diluncurkan demi meningkatkan daya jangkau masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, terutama dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Pada 2019, BOS telah berjalan hampir 14 tahun dan keberadaannya telah banyak membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah negeri dan swasta yang menerima dana BOS.

Komponen pembiayaan yang boleh digunakan melalui BOS diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud). Ketentuan itu dilakukan agar sekolah dapat memanfaatkan anggaran BOS untuk sepenuhnya demi peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Dalam peraturan tersebut juga tertuang kewajiban sekolah untuk mengelola dana secara profesional dengan menerapkan prinsip efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.

Agar pengelolaan dana BOS berlangsung dengan semua prinsip di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sekolah yang tertuang dalam Lampiran II Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Dalam lampiran tersebut dijelaskan sejumlah tujuan mekanisme PBJ, di antaranya untuk mendorong transparansi, meningkatkan pertanggungjawaban belanja pendidikan dengan pencatatan data PBJ sekolah, serta mengurangi potensi dan ruang untuk kecurangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam melaksanakan PBJ sekolah.

Untuk memudahkan sekolah melaksanakan PBJ yang lebih simpel, Kemendikbud menyediakan aplikasi daring (dalam jaringan/*online*) yang cara kerjanya sesederhana membeli barang pada aplikasi lokapasar (*marketplace*) yang ada selama ini. Sistem aplikasi itu diberi nama SIPLah yang merupakan akronim dari Sistem Informasi Pengadaan Sekolah.

Adapun salah satu manfaat penggunaan aplikasi ini adalah menyederhanakan proses administrasi dan penyiapan dokumen pertanggungjawaban. Alasannya karena seluruh riwayat PJB terekam dalam sistem, sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan, dapat langsung dicetak atau diperlihatkan buktinya. Selain itu, melalui SIPLah, sekolah diminta untuk melakukan pembayaran secara nontunai dan hal ini sejalan dengan arah kebijakan Kemendikbud dalam penguatan tata kelola keuangan pendidikan.

Pengelolaan yang Baik

Pengelolaan keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel diyakini dapat meningkatkan kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah karena seluruh dana penggunaan BOS diinformasikan secara terbuka dan bertanggung jawab. Namun, berdasarkan Laporan BOS Triwulan II yang dirilis Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, dalam "Kabar BOS" edisi III, Juli 2019, rata-rata baru 25 persen sekolah yang patuh melaporkan penggunaan dana BOS melalui laman bos.kemdikbud.go.id.

Padahal dalam peraturan disebutkan, sekolah wajib melaporkan setiap penggunaan dana BOS kepada dinas pendidikan berupa dokumen

cetak dan menyampaikan laporan secara daring ke laman tersebut. Informasi penggunaan dana yang disampaikan sebagai laporan daring merupakan informasi yang didapat dari laporan rekapitulasi penggunaan BOS reguler tiap triwulan. Laporan ini harus diunggah ke laman BOS tiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

Sementara itu, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan BOS, sekolah harus memublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi secara lengkap. Dokumen yang wajib dipublikasikan sekolah, yaitu realisasi penggunaan dana tiap sumber dana dan rekapitulasi realisasi penggunaan dana. Publikasi laporan dilakukan melalui pemasangan pada papan informasi sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Penundaan Dana BOS

Dalam Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 disebutkan bahwa untuk sekolah yang tidak menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan

BOS reguler termasuk laporan daring ke laman bos.kemdikbud.go.id, sekolah dapat diberikan sanksi berupa penundaan pengambilan BOS reguler dari rekening sekolah. Dengan adanya sanksi tersebut, Kemendikbud mendorong sekolah untuk senantiasa melaporkan penggunaan dana BOS sehingga seluruh proses pembelajaran di satuan pendidikan dapat tetap berlangsung dengan baik.

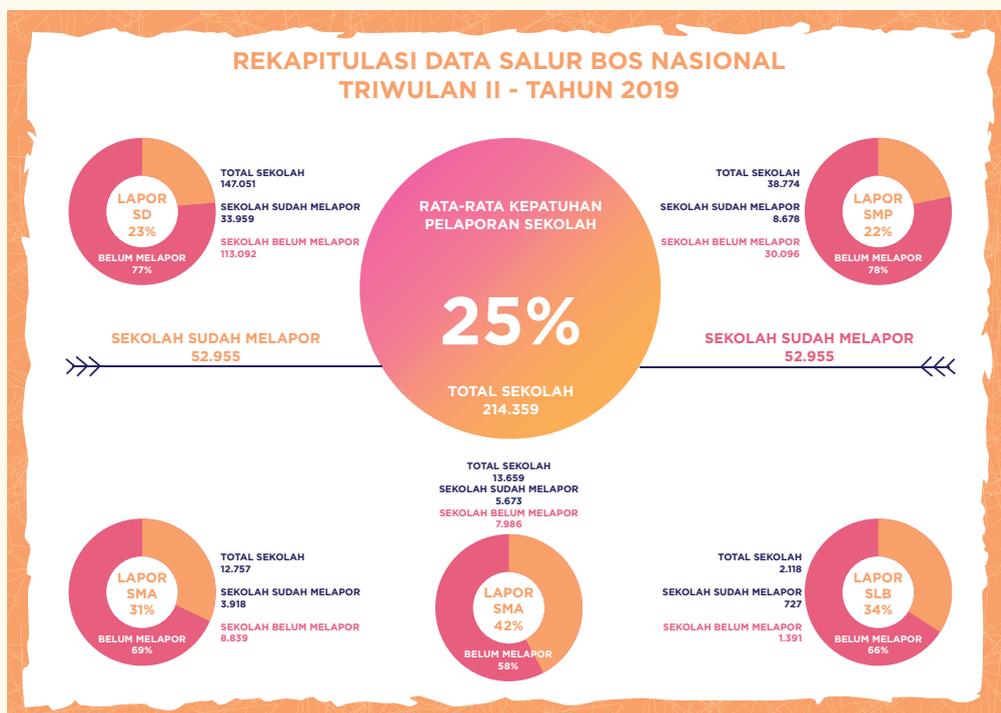
Kepala Subbagian Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Katman mengatakan, beberapa pemerintah daerah telah menerapkan sanksi tersebut kepada sekolah yang tidak melakukan pelaporan seperti yang telah diatur dalam permendikbud. "Kami mendorong pemerintah daerah lainnya juga gencar menyosialisasikan ini ke sekolah agar tidak sekolah tertib lapor," ungkapnya.

Untuk meningkatkan partisipasi sekolah dalam pelaporan penggunaan dana BOS, Katman menyatakan, pihaknya rutin menggelar rekonsiliasi setiap triwulan bersama perwakilan dari pemerintah daerah provinsi. Dari sana, provinsi kemudian menyosialisasikan hasil rekonsiliasi ke sekolah di daerahnya masing-masing. "Bangka Belitung itu partisipasi (pelaporannya) tinggi. Itu karena pemda aktif. Provinsi dituntut aktif menyosialisasikan ke sekolah-sekolah," tambahnya.

Laman BOS

Pengembangan laman bos.kemdikbud.go.id sendiri dilakukan sejak 2018. Melalui laman tersebut, pihak-pihak yang berkepentingan dapat melacak sampai mana penyaluran dana BOS dilakukan. Dengan begitu, tidak ada lagi sekolah yang mengeluh tentang belum cairnya dana BOS. "Kami

Salah satu manfaat penggunaan aplikasi SIPLah ini adalah menyederhanakan proses administrasi dan penyiapan dokumen pertanggungjawaban. Alasannya karena seluruh riwayat PJB terekam dalam sistem.



mengembangkan laman ini karena sebelumnya banyak *complain*, 'sekolah kami belum cair'. Padahal dana BOS sudah disalurkan oleh Kementerian Keuangan. Dengan laman ini, maka sekolah bisa tahu, sampai mana penyaluran dana itu," tutur Katman.

pekerjaan dana BOS, sehingga kualitas pelaksanaan BOS bukan hanya diketahui oleh sekolah, tapi guru dan orangtua," imbuhnya. **(RAN)**

Dari laman ini juga terlihat capaian partisipasi pelaporan penyaluran dan penggunaan dana BOS. Katman mengatakan, kredibilitas data lebih terlihat, sehingga masyarakat dapat ikut mengawal pelaksanaan BOS. Melalui laman tersebut, pihak berharap, masyarakat lebih peduli, terutama ketika memiliki anak yang masih sekolah. "Peduli dalam arti, yaitu melihat atau *keep informed* terhadap penyaluran dan



Sekolah wajib melaporkan setiap penggunaan dana BOS kepada dinas pendidikan berupa dokumen cetak dan menyampaikan laporan secara daring ke laman bos.kemdikbud.go.id.

SIPLah, Platform Elektronik untuk Transparansi Penggunaan Dana BOS



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Katalog Sektorial Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Keduanya diluncurkan untuk mendukung pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. SIPLah menjadi salah satu komitmen Kemendikbud dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel.

SIPLAH MERUPAKAN katalog elektronik sekolah di bawah kewenangan dan pengelolaan Kemendikbud, yang bekerja sama dengan operator pasar daring yang telah ditetapkan. SIPLah dapat diakses melalui laman <https://bos.kemdikbud.go.id> dengan pelaksanaan pengadaan mengacu pada Pedoman Umum Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Sekolah.

Pada tanggal 11 Juli 2019, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6810/A.A6.3/LK/2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Sekolah Melalui SIPLah. Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa realisasi dana BOS melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sekolah dengan nilai transaksi paling banyak Rp50 juta harus dilaksanakan dengan mekanisme daring melalui SIPLah.

Selain itu, pembelian buku teks pendamping dan buku nonteks pendamping melalui dana BOS dilakukan dengan mekanisme daring

melalui SIPLah sebagaimana Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Nomor 2942/D/PB/2019 tentang Pembelian Buku Teks dan Nonteks Melalui Dana BOS Tahun Anggaran 2019. Sementara itu jika dalam pengadaan barang/jasa sekolah tidak dapat melaksanakannya secara daring, maka pengadaan barang/jasa sekolah dilakukan secara luar jaringan (luring) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembuatan SIPLah tidak hanya dikembangkan oleh Kemendikbud, melainkan ada pihak lain yang terlibat dalam pengembangan platform itu. Beberapa pihak yang terlibat antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, jajaran internal Kemendikbud, dan para mitra penyedia. Saat ini terdapat 17 mitra penyedia penerbit buku nonteks dan enam penyedia calon mitra operator pasar daring SIPLah yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Saat acara peluncuran SIPLah di Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta,

Proses Bisnis SIPLah

Dalam pengadaan barang/jasa dengan SIPLah, sekolah memiliki beberapa kewajiban:



1

Sekolah harus mencari data/informasi atas kewajaran harga barang/jasa melalui harga pasar setempat, informasi resmi instansi pemerintah, atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

2

Sekolah juga harus melakukan perbandingan dan/atau negosiasi kepada penyedia barang/jasa sehingga tercapai kesepakatan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

3

Dalam hal Kemendikbud telah menetapkan acuan harga resmi seperti harga eceran tertinggi, tarif resmi, negosiasi kontrak payung, atau acuan harga resmi lain, maka harga resmi digunakan sebagai harga acuan negosiasi sekolah kepada penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan zona setempat, tanpa penambahan ongkos kirim. Jika harga resmi belum termasuk komponen ongkos kirim, maka dapat ditambahkan komponen ongkos kirim pada harga acuan negosiasi dengan tetap memperhatikan batas kewajaran total harga yang dibayarkan oleh sekolah.



(Sumber: Bahan Paparan Sosialisasi 28 Agustus 2019)

Selasa (25/6/2019), Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, inovasi dan elektronifikasi sektor PBJ merupakan suatu keniscayaan. Apalagi hal ini juga sesuai dengan amanat dan kebijakan pemerintah untuk penguatan tata kelola keuangan pendidikan melalui Perpres PBJ Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Kemendikbud juga mengeluarkan peraturan sendiri mengenai pengadaan barang/jasa di sekolah melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Berdasarkan Permendikbud tersebut, pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sekolah dapat dilaksanakan secara daring atau luring. PBJ di sekolah yang dilakukan secara daring harus melalui sistem PBJ sekolah yang ditetapkan oleh Kemendikbud.

Karena itulah Kemendikbud lalu merancang SIPLah untuk digunakan dalam PBJ

sekolah yang dilakukan secara daring. SIPLah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Reguler di Kemendikbud. BOS Reguler merupakan program Pemerintah Pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.

SIPLah merupakan suatu ekosistem, bukan aplikasi tersendiri. SIPLah dirancang untuk memanfaatkan lokapasar (*marketplace*) yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Lokapasar yang dapat dikategorikan sebagai SIPLah harus memiliki fitur tertentu dan memenuhi kebutuhan Kemendikbud.

Di dalam SIPLah, ada empat jenis layanan yang disediakan Kemendikbud. Pertama, Layanan Identitas, berupa layanan *log in* untuk verifikasi data sekolah, kepala sekolah, bendahara sekolah. *Log in*

Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan, inovasi dan elektronifikasi sektor PBJ merupakan suatu keniscayaan. Apalagi hal ini juga sesuai dengan amanat dan kebijakan pemerintah untuk penguatan tata kelola keuangan pendidikan melalui Perpres PBJ Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.

Tata Cara Proses Pengadaan Barang/Jasa oleh Sekolah

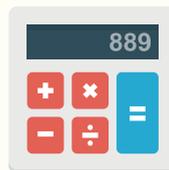
Dengan menggunakan SIPLah, setidaknya terdapat empat manfaat dibandingkan dengan pengadaan barang/jasa secara manual.



Pertama, SIPLah dapat mengakses penyedia sekolah lain sehingga opsi lebih luas. Sedangkan pada pengadaan manual, referensi daftar penyedia terbatas pada toko langganan sekolah sehingga opsi pemilihan terbatas.



Kedua, tingkat harga cenderung lebih rendah (secara keseluruhan). Hal ini berbeda dengan pengadaan manual di mana keterbatasan pemilihan menjadikan harga berada di tingkat tinggi – rendah.



Ketiga, SIPLah dapat menyediakan dokumentasi elektronik untuk setiap elektronik, dan bukan secara manual oleh masing-masing sekolah.



Keempat, SIPLah membuat transaksi lebih transparan dengan ketersediaan bank data, berbeda dengan pengadaan manual di mana transparansi belum optimal dengan keterbatasan ketersediaan informasi transaksi sekolah.

(Sumber: Bahan Paparan Sosialisasi 28 Agustus 2019)

dilakukan dengan menggunakan SSO Dapodik, dan lokapasar tidak perlu melakukan verifikasi pembeli. Kedua, Layanan Anggaran, yaitu menggunakan fasilitas Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sehingga ketika sekolah melakukan belanja, harus terlebih dahulu merencanakan pembelanjaan mereka di RKAS.

Ketiga, Layanan Realisasi, di mana pelaporan transaksi yang terjadi di lokapasar akan secara otomatis dimasukkan ke dalam RKAS, sehingga sekolah tidak perlu melakukan dua

kali *entry* laporan. Keempat, Layanan Pengawasan, yang memungkinkan Kemendikbud dapat mengakses *dashboard* pelaporan untuk seluruh transaksi yang terjadi di lokapasar sehingga pihak-pihak tertentu dapat melakukan pengawasan pelaporan sekolah. Dengan SIPLah, Kemendikbud tidak mengatur mekanisme pembayaran. Sekolah menggunakan rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD), kemudian lokapasar diperbolehkan menggunakan mekanisme pembayaran sendiri, misalnya dengan transfer, *virtual account*, kartu kredit, *e-money*, dan sebagainya. **(DES)**

Peran Masyarakat

Bersama-sama Mari Kawal Penggunaan Dana BOS

Satuan pendidikan yang menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib melaporkan penggunaan anggaran tersebut secara transparan dan akuntabel. Masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana BOS tersebut demi terciptanya mutu sekolah yang lebih baik. Pengawasan paling sederhana yang dapat dilakukan masyarakat adalah melalui laman bos.kemdikbud.go.id. Apa saja yang bisa dipantau dari laman tersebut?

SEBUAH TEROBOSAN dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pemantauan anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Laman bos.kemdikbud.go.id kini menyediakan informasi yang dapat diakses bebas oleh masyarakat umum sehingga dapat memantau secara langsung penyerapan, pencairan, hingga penggunaan dana BOS. Dengan demikian, masyarakat dapat memastikan apakah satuan pendidikan tempat anaknya bersekolah telah atau belum menerima dan memanfaatkan dana BOS.

Dengan fasilitas tersebut, orang tua siswa dapat lebih kritis mengawasi penggunaan dana BOS, demi terciptanya transparansi anggaran bantuan tersebut. Sebaliknya, jika berdiam diri, transparansi penggunaan BOS tidak akan terwujud dengan baik.

Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Ananto Kusuma Seta, menuturkan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban penggunaan dana BOS perlu mengalami perubahan di antaranya melalui peran masyarakat atau komite sekolah.

Menurutnya, selama ini pengawasan dana BOS dilakukan oleh aparatur

pemerintahan, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Namun sekarang ini, sudah waktunya masyarakat juga ikut berperan serta dalam mengawasi penggunaan dana BOS.

“Akuntabilitas BOS (itu) harus. Selama ini pemeriksaan hanya dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Akuntabilitas pendidikan harus bisa dilakukan oleh semua. Jadi publik juga ikut mengawasi dana pendidikan itu,” ungkap Ananto di kantor Kemendikbud, Jakarta, pada Selasa (24/09/2019).

Menurut Ananto, saat ini pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab semua anggota masyarakat. Dengan demikian, pengawasan terhadap penggunaan anggaran pun harus dilakukan bersama antara pemerintah dengan masyarakat.

Dengan fasilitas tersebut, orang tua siswa dapat lebih kritis mengawasi penggunaan dana BOS, demi terciptanya transparansi anggaran bantuan tersebut. Sebaliknya, jika berdiam diri, transparansi penggunaan BOS tidak akan terwujud dengan baik.

Yang menarik juga di laman bos.kemdikbud.go.id, ada menu kontak untuk aduan masyarakat. Pengaduan ini sebagai salah satu upaya proses transparansi bantuan BOS, masyarakat dapat memberikan laporan jika menemukan penyalahgunaan dana BOS.

Dorong untuk Peningkatan Kualitas

Hal berikutnya yaitu masyarakat dapat mendorong penggunaan dana pendidikan itu untuk peningkatan kualitas sekolah sesuai kebutuhan serta untuk memenuhi kreativitas guru dan siswa dalam mengembangkan pembelajaran. Dana BOS dapat digunakan, di antaranya untuk pengembangan perpustakaan termasuk pengadaan buku pelajaran, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler siswa, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah, pembayaran honor dan lain sebagainya.

“Kalau ada sekolah yang pakai dana BOS tidak sesuai maka publik yang akan mencatat. Ini contoh dorongan dari publik ikut mengawal penggunaan dananya. Menurut saya, ini harus dimulai dari sekarang. Jadi akuntabilitas bukan berdasarkan kuitansi saja, tapi benar-benar sesuai kreativitas dan kebutuhan sekolah,” ungkap Ananto.

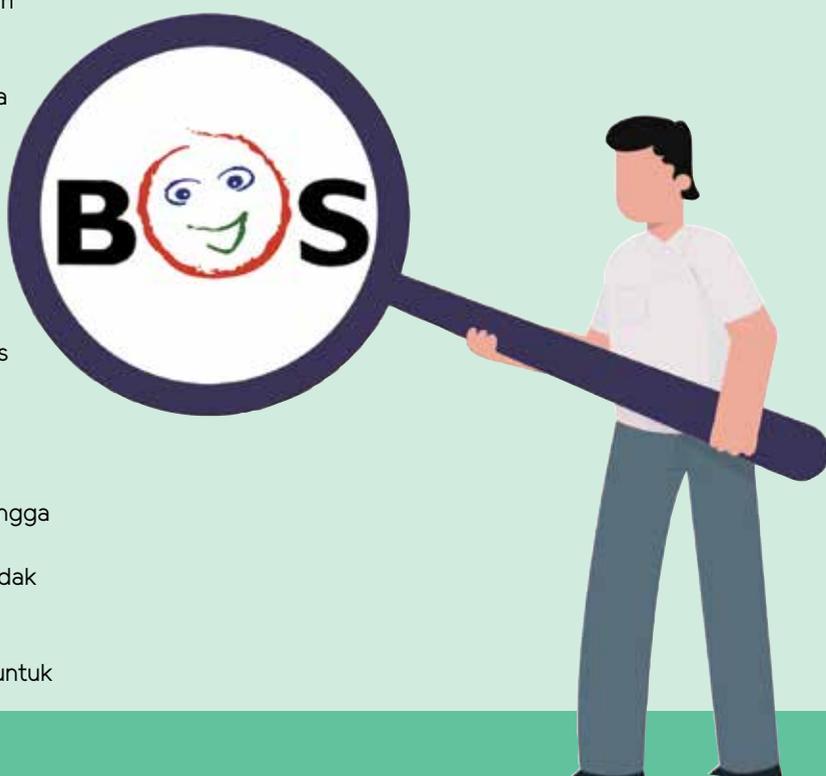
Sebab, tambah Ananto, kebutuhan setiap sekolah berbeda-beda sehingga penggunaan dana pun berbeda sesuai prioritas masing-masing. Tidak bisa lagi sekarang ini jumlah dana diseragamkan semua sekolah. Ada sekolah memanfaatkan dana BOS untuk

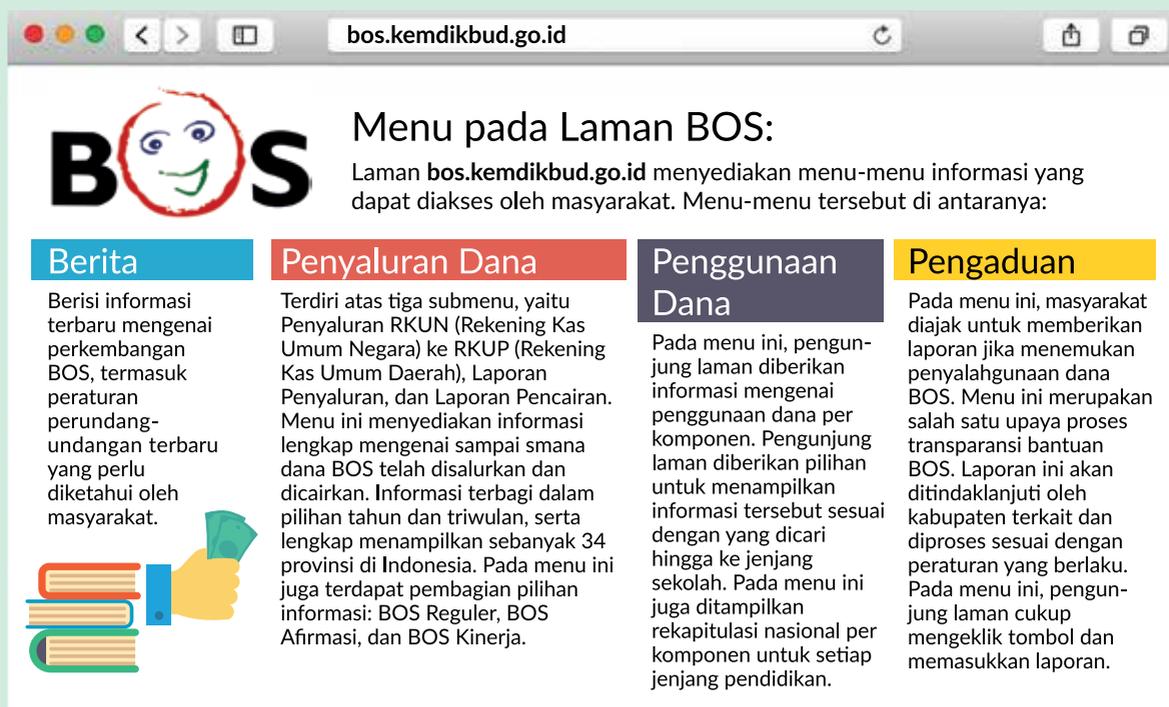
pelatihan guru, pengadaan buku pelajaran, pembelian peralatan, dan lain-lain. Semua itu merupakan bagian dari peningkatan kualitas pendidikan.

Melalui Laman

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Evaluasi Perencanaan Pelaksanaan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Katman, mengatakan, sejak tahun 2018, pemerintah telah mengembangkan sistem atau aplikasi untuk memotret capaian pencairan dan penggunaan dana BOS.

“Latar belakangnya kami sering ditanya, BOS yang sudah salur berapa provinsi dan berapa sekolah? Kalau dihitung siswa dapat berapa? Itu kita kesulitan juga, karena setiap menjawab





BOS

Menu pada Laman BOS:

Laman bos.kemdikbud.go.id menyediakan menu-menu informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Menu-menu tersebut di antaranya:

Berita	Penyaluran Dana	Penggunaan Dana	Pengaduan
Berisi informasi terbaru mengenai perkembangan BOS, termasuk peraturan perundang-undangan terbaru yang perlu diketahui oleh masyarakat.	Terdiri atas tiga submenu, yaitu Penyaluran RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUP (Rekening Kas Umum Daerah), Laporan Penyaluran, dan Laporan Pencairan. Menu ini menyediakan informasi lengkap mengenai sampai smana dana BOS telah disalurkan dan dicairkan. Informasi terbagi dalam pilihan tahun dan triwulan, serta lengkap menampilkan sebanyak 34 provinsi di Indonesia. Pada menu ini juga terdapat pembagian pilihan informasi: BOS Reguler, BOS Afirmasi, dan BOS Kinerja.	Pada menu ini, pengunjung laman diberikan informasi mengenai penggunaan dana per komponen. Pengunjung laman diberikan pilihan untuk menampilkan informasi tersebut sesuai dengan yang dicari hingga ke jenjang sekolah. Pada menu ini juga ditampilkan rekapitulasi nasional per komponen untuk setiap jenjang pendidikan.	Pada menu ini, masyarakat diajak untuk memberikan laporan jika menemukan penyalahgunaan dana BOS. Menu ini merupakan salah satu upaya proses transparansi bantuan BOS. Laporan ini akan ditindaklanjuti oleh kabupaten terkait dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada menu ini, pengunjung laman cukup mengklik tombol dan memasukkan laporan.

harus bertanya ke provinsi dan provinsi pun belum tentu punya data. Itu data untuk kondisi sekarang. Apalagi kondisi tahun-tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Melalui laman tersebut, masyarakat bisa mengidentifikasi atau *tracking* dana BOS sudah sampai mana. Misalnya dari Kementerian Keuangan sudah cair di berapa provinsi untuk tri wulan satu, dan provinsi bersangkutan bisa membuka akses, tanpa bertanya atau komplain.

Selain itu, kemudahan membaca penyaluran dan penggunaan dana, masyarakat awam yang memiliki pemahaman dalam membaca angka pun dapat mengetahui seberapa besar dana BOS cair di sekolah tempat anaknya belajar, penggunaannya untuk apa saja dan laporannya bagaimana.

“Yang penting sebagai orang tua, apa yang perlu ‘saya’ ketahui? Yang perlu diketahui bagaimana cara mencari sekolah di tempat anak saya sekolah, terima BOS-nya berapa, sudah cair atau belum, begitu saja. Dia tidak perlu membaca secara keseluruhan,” disampaikan.

Yang menarik juga di laman bos.kemdikbud.go.id, ada menu kontak untuk aduan masyarakat. Pengaduan ini sebagai salah satu upaya proses transparansi bantuan BOS, masyarakat dapat memberikan laporan jika menemukan penyalahgunaan dana BOS.

Laporan ini akan ditindak lanjuti oleh kabupaten terkait dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemendikbud juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses BOS agar digunakan sebagaimana semestinya dan memberi laporan jika mendapatkan temuan penyalahgunaan dana BOS.

“Harapannya masyarakat itu lebih peduli, terutama ketika memiliki anak yang masih sekolah. Minimal peduli dengan lingkungan di mana anaknya sekolah,” imbuhnya. Peduli dalam arti, yaitu melihat atau *keep informed* terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana BOS, sehingga kualitas penguatan dana BOS bukan hanya diketahui oleh sekolah, tetapi guru dan orang tua juga tahu.

(DNS)

Peran Komite Sekolah

Perlu Awasi Penggunaan Dana BOS di Sekolah

Tahun depan alokasi dana operasional sekolah (BOS) akan meningkat menjadi sekitar Rp54,31 triliun, akan ada kenaikan sekitar Rp4,47 triliun jika dibandingkan dengan perkiraan serapan dana BOS tahun ini. Tentunya dengan dana yang besar tersebut, sekolah harus semakin transparan dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS. Namun siapa garda terdepan yang mampu mengawasi hal itu?

ADA SEBUAH badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional, dan akuntabel. Badan mandiri yang disebut dengan komite sekolah ini perlu mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, komite sekolah juga dapat memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, termasuk dalam penggunaan dana BOS.

Komite sekolah menjadi titik awal dimulainya era keterbukaan informasi publik dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan dana sekolah, khususnya dalam pengawasan pelayanan pendidikan di sekolah. Komite sekolah wajib beranggotakan orang-orang yang benar-benar mewakili masyarakat dan

Fungsi Komite Sekolah:

A Memberikan **pertimbangan** dalam penentuan serta **pelaksanaan kebijakan** pendidikan terkait:

- Kebijakan dan program sekolah;
- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah;
- Kriteria kinerja sekolah;
- Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah;
- Kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain.

B Menggalang **dana** dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia



berasal dari berbagai unsur. Komite sekolah beranggotakan orang tua atau wali murid, komunitas sekolah, dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta menekankan, keterbukaan informasi terkait dana BOS itu sangat penting agar mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat sebagai pengguna dari satuan pendidikan. Kepala sekolah dan guru pun harus mampu menjaga diri agar tidak terjadi penyelewangan dana BOS.

“Kalau bisa setiap tahun anggaran baru, terima dana BOS, laporannya ditempel di tembok sekolah (majalah dinding sekolah),” ujiannya pada acara *Global Educational Supplies and Solutions Indonesia 2019* di Jakarta, pertengahan September 2019 yang lalu.

Dalam pengawasannya, komite

sekolah dapat melapor ke layanan pengaduan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) jika menemukan penyalahgunaan dana BOS disertai dengan bukti-bukti yang benar. Selain itu komite sekolah juga bisa mengadukannya melalui layanan LAPOR yang dikelola oleh Kantor Staf Kepresidenan. Tak hanya komite sekolah, orang tua siswa juga berhak mengetahui penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah. Orang tua bisa bekerja sama dengan komite sekolah dalam mengawasi hal itu.

Ananto menambahkan, dana BOS bisa digunakan untuk penyediaan buku pelajaran, pelatihan guru, dan lainnya termasuk pengadaan gawai. Ini bagian dari peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Penggunaan dana BOS telah diatur dalam Lampiran Peraturan Mendikbud Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Juknis BOS Reguler, sehingga komite sekolah dapat mengawasi penggunaan dana BOS berdasarkan peraturan tersebut. **(ABG)**

usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui **upaya kreatif dan inovatif**;

C **Mengawasi** pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan **peraturan** perundang-undangan; dan

D **Menindaklanjuti** keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas **kinerja sekolah**.

Kanal-kanal Pengaduan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:

- Pengaduan di Unit Layanan Terpadu Kemendikbud ult.kemdikbud.go.id
- Whistle Blowing System Kemendikbud wbs.kemdikbud.go.id

“Kalau bisa setiap tahun anggaran baru, terima dana BOS, laporannya ditempel di tembok sekolah (majalah dinding sekolah).”

Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta

Penguatan Tata Kelola Pendidikan Melalui Sistem Pengadaan Daring

Pengelolaan pendidikan yang baik menjadi suatu keharusan. Selain didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang mumpuni, upaya tersebut juga perlu ditunjang dengan alat atau sistem yang mengefektifkan proses. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengembangkan sistem pengadaan daring di sekolah untuk memudahkan satuan pendidikan melakukan proses pembelian sarana dan prasarana sekolah.

Perhatian Kemendikbud untuk mulai melakukan penguatan tata kelola pendidikan dilatarbelakangi:

- **Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014**
Memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam pengelolaan pendidikan.
- **65 persen** anggaran fungsi pendidikan merupakan dana transfer daerah.
- **42 persen** kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
- **Sektor pendidikan** merupakan sektor tiga terbesar untuk korupsi terkait proses PBJ.
- **72 persen** kasus korupsi pendidikan melibatkan dinas pendidikan dan/atau sekolah.



Elektronifikasi dalam pengadaan barang dan jasa terbukti mengefisienkan waktu pelaksanaan.

Maka elektronifikasi pengelolaan dana transfer adalah solusi.

Elektronifikasi dilakukan dengan:

- **Katalog elektronik sekolah**
Katalog elektronik yang berisi produk-produk pendidikan yang dapat diakses oleh sekolah berupa buku teks Kurikulum 2013, alat peraga pendidikan, dan buku non-teks.
- **Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah)**

Sistem elektronik yang dapat digunakan oleh sekolah untuk melaksanakan proses PBJ dana BOS secara daring. SIPLah dirancang untuk memanfaatkan market place (lokapasar). Selain fitur PBJ, SIPLah juga dilengkapi fitur untuk tertib administrasi.



Perbandingan Sistem Pengadaan Manual dan Berbasis Daring

Manual

- Referensi daftar penyedia terbatas pada toko langganan sekolah.
- Opsi pemilihan terbatas.

Keterbatasan pemilihan menjadikan harga berada di kisaran tinggi-rendah.

Dokumentasi dilakukan secara manual oleh masing-masing sekolah.

Belum optimal dengan keterbatasan informasi transaksi sekolah.

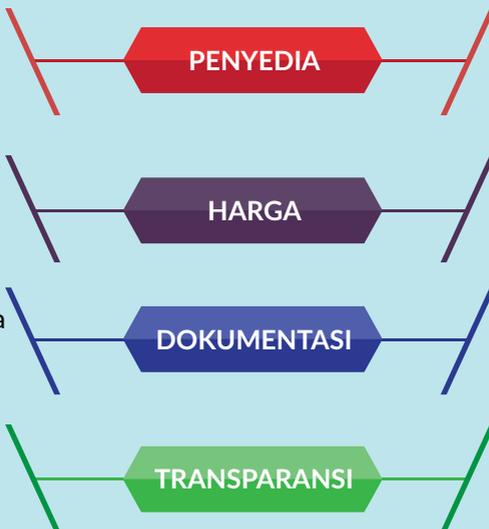
SIPLah

Dapat mengakses penyedia sekolah lain sehingga opsi lebih luas.

Kisaran harga cenderung lebih rendah (secara keseluruhan).

Dokumentasi elektronik untuk setiap transaksi.

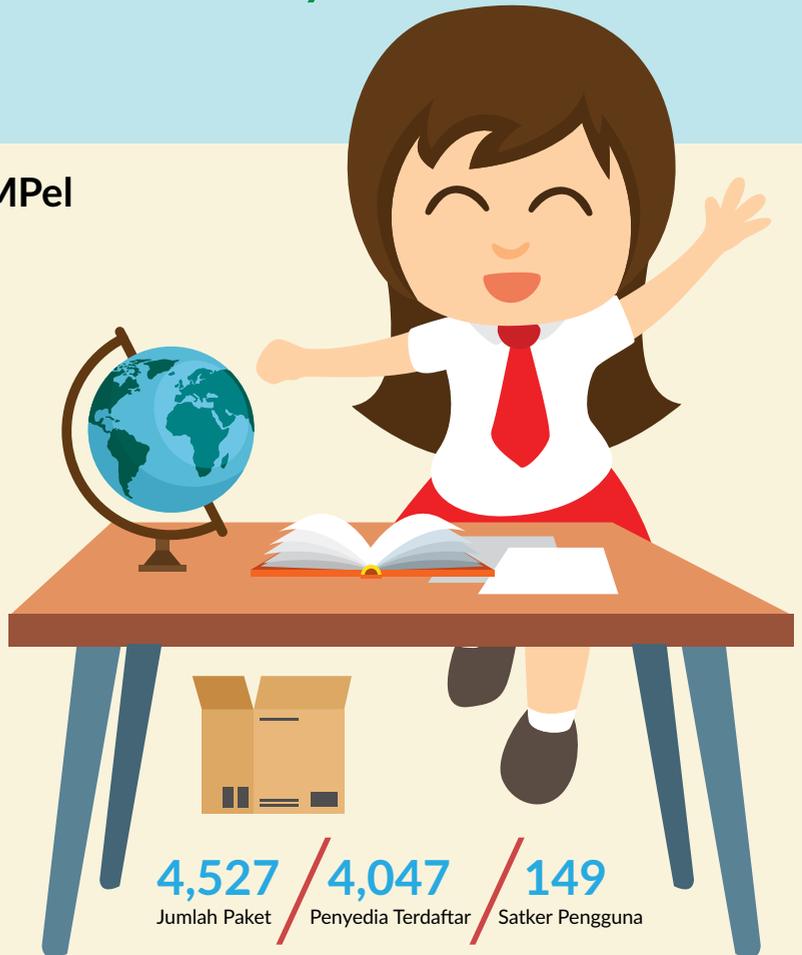
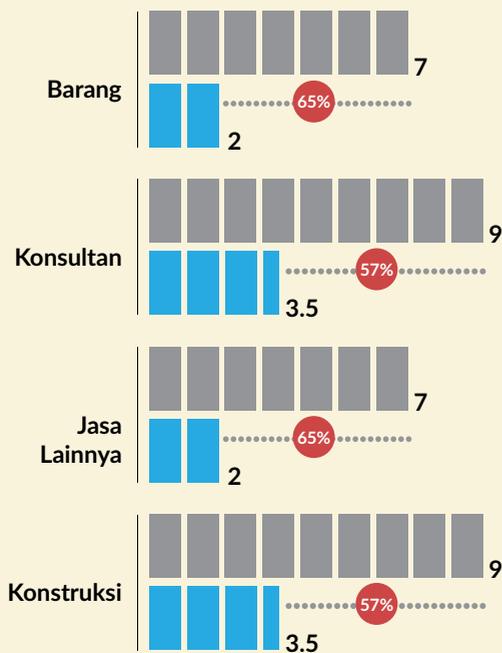
Bank data membuat transaksi lebih transparan.



Statistik efisiensi waktu SIMPel

(dalam hari dan %)

■ KONVENSIONAL ■ SIMPel



4,527 / 4,047 / 149
 Jumlah Paket / Penyedia Terdaftar / Satker Pengguna

Bentuk Karakter “Antikorupsi” pada Diri Siswa dan Guru

Mewujudkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi (ZI-WBK) di lingkungan sekolah tidak hanya cukup melalui perbaikan pada tata kelola keuangan. Pembentukan insan berkarakter juga dilakukan, salah satunya melalui program “Saya Anak Antikorupsi” (SAAK). Program yang diinisiasi pada akhir 2018 yang lalu kemudian diikuti dengan program “Saya Guru Antikorupsi” (SGAK) di tahun 2019.

KEDUA PROGRAM penumbuhan karakter antikorupsi di lingkungan sekolah itu kemudian mendapat dukungan dari lembaga antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menilai pencegahan korupsi lebih penting daripada penindakan, dan penanaman karakter antikorupsi sejak lingkungan sekolah merupakan salah satu upaya pencegahan dalam jangka panjang. Pada peluncuran program SAAK di kantor Kemendikbud, Desember 2018 lalu, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan turut hadir. Dalam peluncuran program tersebut, sebanyak 720 siswa SMA dan SMK dari Jakarta dan sekitarnya hadir, dan mereka bertekad menjadi agen-agen antikorupsi di sekolah mereka.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin, mengatakan, program SAAK dan SGAK merupakan upaya untuk menciptakan generasi muda yang tidak sekadar cerdas secara intelektual, namun juga jujur berintegritas. Namun, hasil program-program ini tidak dapat langsung dipanen dalam waktu dekat. Untuk mencapai tujuan generasi muda cerdas dan berintegritas, memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dan konsisten.

Gerakan SAAK dan SGAK mempunyai visi menciptakan generasi muda cerdas, berintegritas, dan berkarakter. “Kami memperkenalkan program ‘Saya anak antikorupsi’ pada anak di sekolah untuk membangun budaya jujur, budaya antikorupsi sehingga memahami dan sejak

dini menolak tindakan korupsi serta sifat koruptif,” katanya. Menurut Irjen, para siswa berprestasi bersama dengan KPK terutama dibantu sekolah dan seluruh unsur sekolah dapat memasyarakatkan budaya antikorupsi dan mencegah tindakan korupsi sejak dini.

Misi program SAAK adalah memperkuat ketakwaan generasi muda kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kecintaan terhadap tanah air Indonesia, menanamkan nilai antikorupsi kepada generasi muda dengan menekankan pada kesederhanaan, kegigihan, keberanian, kerja sama, kedisiplinan, keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan kepedulian. Selain itu, SAAK diimplementasikan melalui penumbuhkembangan kebiasaan antikorupsi dan jujur sebagai bentuk pendidikan karakter.

Melalui program SAAK, Muchlis berharap sekolah dapat membentuk agen-agen SAAK. Program SAAK juga akan digalakkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Irjen Kemendikbud berharap program ini bisa berjalan dengan baik, dan anak-anak beserta seluruh warga sekolah bisa bahu membahu berkontribusi membangun budaya antikorupsi di lingkungan



keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengapresiasi program-program Kemendikbud dalam membina agen-agen antikorupsi di lingkungan sekolah. Basaria mengatakan peran KPK adalah sebagai *trigger mechanism*, yaitu pendorong untuk mencegah korupsi. Basaria juga mengajak para siswa untuk memahami korupsi dan pencegahannya melalui berbagai media seperti buku, infografis, dan film pendek. Setelah memahami, para siswa perlu menyusun rencana aksi untuk mengimplementasikan karakter antikorupsi di lingkungan sekolah.

Sembilan nilai antikorupsi yang ingin ditumbuhkan sejak dini yaitu jujur, sederhana, peduli, berani, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan gigih. Karakter-karakter tersebut bukan untuk dihafal atau sekadar diketahui, namun harus diimplementasikan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Anak-anak diperkenalkan dengan karakter-karakter tersebut, didorong untuk melakukan perilaku-perilaku yang mencerminkan karakter tersebut dalam kehidupan mereka.

Tahun 2019, kegiatan SAAK dan SGAK sudah dilakukan di tiga kota yaitu Jakarta; Medan, Sumatra Utara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. Dari kalangan siswa, peserta yang diundang adalah ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Ketua OSIS dipilih karena mereka adalah *influencer* di lingkungan siswa. Diharapkan para ketua OSIS tersebut dapat menularkan pengetahuan yang mereka dapat dari kegiatan SAAK kepada teman-temannya. Selain itu para ketua OSIS juga didorong merumuskan program-program antikorupsi yang dapat diimplementasikan di sekolah

mereka. Setelah kegiatan di tiga kota tersebut, kegiatan SAAK dan SGAK akan digulirkan di kota-kota lain di Indonesia.

Pada kegiatan SAAK dan SGAK, Kemendikbud juga menggandeng unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbud di daerah-daerah. Dalam kegiatan lokakarya tersebut digunakan metode bermain, belajar dan berbudaya. Permainan-permainan yang mendorong kerja sama diberikan dalam kegiatan-kegiatan ini. Para peserta juga didorong untuk menyusun program antikorupsi untuk diterapkan di sekolah masing-masing. Peserta saling bertukar pikiran, bahkan tidak jarang berdebat antarpeserta untuk merumuskan program-program yang bermanfaat dan bisa diimplementasikan.

Narasumber yang dihadirkan antara lain dari KPK, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud, *motivator*, *influencer*, dan juga para seniman. Tiap sesi dalam kegiatan tersebut dilaksanakan dengan suasana bermain yang menyenangkan, namun tetap memasukkan substansi antikorupsi yang telah ditentukan. Program aksi ini dilakukan melalui pendekatan sesuai dunia anak, seperti pertunjukan pentas kesenian, mendongeng, olahraga dan permainan dengan konten membangun pemahaman betapa berbahayanya tindak kejahatan korupsi bagi dunia pendidikan.

Program SAAK dan SGAK akan terus digulirkan untuk menularkan agen-agen antikorupsi di lingkungan sekolah. Program tersebut memang tidak akan terlihat hasilnya dalam waktu singkat. Namun dengan usaha yang sungguh-sungguh dan konsisten, impian memiliki generasi penerus bangsa yang cerdas dan berintegritas dapat diwujudkan.

(WID)

Ketua OSIS karena mereka adalah influencer di lingkungan siswa. Diharapkan para ketua OSIS tersebut dapat menularkan pengetahuan yang mereka dapat dari kegiatan SAAK kepada teman-temannya.



Sekolah “Bersih”, Generasi Berintegritas, Indonesia Berkarakter!

Program Saya Anak Anti Korupsi (SAAK) dan Saya Guru Anti Korupsi (SGAK) menjadi salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas, berintegritas, dan berkarakter. Dari program ini terbentuk agen-agen SAAK dan SGAK di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat menularkan karakter baik kepada sesama.

SASARAN UTAMA dalam pelaksanaan program antikorupsi ini adalah sekolah, karena melalui generasi muda ini diharapkan perubahan-perubahan bagi bangsa ke arah yang lebih positif di masa datang dapat terlaksana. Selain itu, guru sebagai panutan di sekolah juga diharapkan dapat menjadi contoh baik dan menularkan semangat antikorupsi di sekolah.

Hingga saat ini, pembentukan agen SAAK telah dilakukan di tiga provinsi yaitu Jakarta, Medan, dan Makassar. Sedangkan agen SGAK baru dibentuk pada dua provinsi, yaitu Medan dan Makassar. Setiap siswa dan guru yang dikirim sebagai wakil sekolahnya membuat rencana aksi dalam upaya mendukung dan

mengimplementasikan program SAAK dan SGAK di sekolah masing-masing.

Berdasarkan rencana aksi yang telah dibuat, selanjutnya akan dipresentasikan dan dilakukan diskusi dengan pihak Kemendikbud, KPK, dinas pendidikan, serta sekolah lainnya yang ikut serta. Dari hasil diskusi tersebut, banyak contoh kasus korupsi yang dijumpai di sekolah-sekolah, misalnya siswa menyontek ketika sedang ujian, siswa tidak segera bergegas kembali masuk kelas ketika bel masuk pelajaran dimulai, dan guru yang memberikan nilai tidak objektif kepada siswa karena memandang status orang tua siswa tersebut (misalnya karena anak kepala sekolah).

Banyak manfaat yang diperoleh peserta agen SAAK, seperti yang dirasakan oleh Muhammad Nabil Qashmal, siswa Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 8 Jakarta. Bagi Nabil, keikutsertaannya dalam pembentukan agen sangat membuka wawasannya tentang korupsi. "Selama mengikuti SAAK, saya merasakan bahwa pemahaman saya mengenai korupsi semakin meluas, bahwasanya korupsi itu tidak sesempit yang awalnya saya pikirkan, tetapi makna korupsi dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari sangatlah luas," ujarnya.

Senada dengan Nabil, Muhammad Salim, siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 17 Jakarta ini juga sangat mengapresiasi program SAAK. Baginya, program ini sangat bernilai positif dan bermanfaat. Tidak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa banyak ilmu dari program SAAK yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan membuka pola pikir, pandangan, serta mental untuk menentukan keputusan secara matang di masa yang akan datang.

"Hati saya amat terpenggil, sehingga saya amat bersemangat untuk menjadi pendorong pelapor penggerak untuk merubah mental rakyat Indonesia dari budaya korupsi," ungkapnya penuh semangat.

Para peserta SAAK dan SGAK mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi salah satu agen perubahan antikorupsi. Salah satu agen SAAK, Alvinaldy Fitrah dari SMA Negeri Unggulan M.H Thamrin Jakarta mengungkapkan kesan setelah mengikuti kegiatan tersebut.

"Saya merasa bisa menjadi agen SAAK bersama dengan teman-teman semua karena saya selalu menekankan kepada teman-teman untuk berkolaborasi bukan berkompetisi. Sedangkan pesan saya untuk teman-teman, yaitu jangan berhenti di tempat ini, jangan berhenti sampai di sini, jangan berhenti di tempat duduk kalian yang sedang kalian duduki saat ini. Mari kita sama-sama bekerja sama memberantas korupsi!" seru Alvinaldy dengan semangat.

Setiap siswa dan guru yang dikirim sebagai wakil sekolahnya membuat rencana aksi dalam upaya mendukung dan mengimplementasikan program SAAK dan SGAK di sekolah masing-masing.

Selain bagi siswa-siswi, program antikorupsi juga dirasa sangat bermanfaat untuk guru-guru. Buhari, guru SMKN 2 Makassar menyatakan bahwa dengan pembentukan agen SGAK sangat penting.

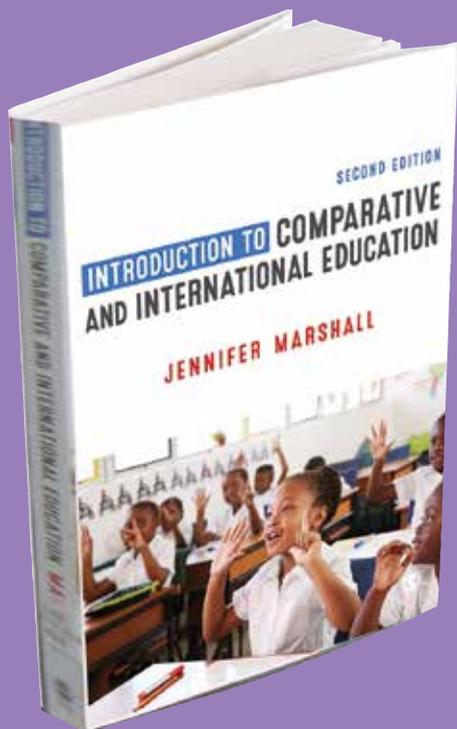
"Saya berpikir acara pembentukan agen ini sangat esensial sekali dalam kehidupan kita, apalagi kita adalah seorang guru, sebuah cerminan yang terbaik yang perlu diajarkan kepada anak didik kita," tutur Buhari.

Bahaya korupsi yang kian mengintai membuat Rustina, guru dari SMAN 5 Medan, Sumatera Utara, semakin menyadari bahwa program antikorupsi harus terus dilaksanakan. Baginya, gerakan antikorupsi merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi bersama-sama. Sekecil apapun perbuatannya, tapi jika sudah mengambil hak orang lain merupakan salah satu bentuk korupsi.

"Saya seorang pendidik, program antikorupsi harus saya implementasikan karena saya guru anti korupsi. Ilmu yang didapat bahwa korupsi bukan hanya pada uang dan penjara, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan diri dari apa yang kita lakukan dan lihat, jangan sampai kita mengambil hak orang lain," katanya dengan bijak. (PRM, WID)

Pengaruh Globalisasi dalam Pendidikan Internasional

Perkembangan teknologi informasi saat ini juga turut berpengaruh pada berkembangnya ilmu pengetahuan, termasuk dalam dunia pendidikan.



SALAH SATUNYA dengan munculnya sebuah ilmu baru, yaitu pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif secara terminologis adalah disiplin ilmu yang mempelajari sistem-sistem pendidikan baik dalam satu negara maupun antarnegara yang menyangkut sistem pendidikan formal, non-formal dan informal, teori dan praktik pendidikan, serta latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, dan budaya yang mempengaruhi sistem pendidikan.

Pendidikan komparatif dan internasional saat ini menjadi bidang studi yang semakin penting. Jennifer Marshall menulis buku berjudul “Introduction to Comparative and International Education” yang membahas tentang tema-tema utama pendidikan dan globalisasi. Buku ini mengupas mengenai teori dan penelitian penting yang mengeksplorasi bagaimana globalisasi dapat memengaruhi dunia pendidikan, memberi pemahaman tentang faktor sosial, ekonomi, historis, dan budaya yang relevan.

Buku ini terdiri atas dua bab, yaitu pendidikan komparatif dan pendidikan internasional, masing-masing bab terdiri atas 6 subtema. Penulis menjelaskan studi kasus dari seluruh dunia memunculkan pertanyaan yang membangkitkan pemikiran tentang topik bab, bagaimana melakukan penelitian menggunakan sumber sekunder signifikan dari data internasional komparatif (termasuk OECD, PISA, TIMMS), hubungan antara pembangunan, pendidikan, dan ketimpangan, tujuan dan peran pendidikan multikultural dan kewarganegaraan, serta gender dan pendidikan dalam konteks global.

Buku ini cocok dibaca oleh mahasiswa ilmu pendidikan dan keguruan, guru, atau akademisi. Pembaca akan mudah memahami isi buku karena penulis memberikan ilustrasi tabel dan grafis guna memperjelas informasi yang ditulis. **(RWT)**



Deskripsi Fisik

Judul : Introduction to Comparative and International Education
Penulis : Jennifer Marshall
Tahun Terbit : 2019
Halaman : viii + 239 hlm.: ilus.; 25 cm.
Bahasa : Inggris
Jenis Sampul: Tipis

Jika ingin mengetahui informasi selengkapnya dari koleksi ini, silakan memindai kode QR berikut. atau datang langsung ke Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

REPOSITORI

KEMENDIKBUD

<http://repositori.kemdikbud.go.id>



10,235
Total Item

1,293,187
Total Unduhan



Years

Subjek

Divions

Authors

- Buku (1,894)
- Bahasa Kesusastran (3,650)
- Guru (2,489)
- Kebijakan Umum Kemendikbud (1,538)
- Kebudayaan (2,002)
- Orang Tua (200)
- Pendidikan Khusus (90)
- Pendidikan Nonformal dan Informal (425)
- Sekolah (2,929)
- Siswa (1,504)
- Teknologi Informasi (53)



Pekan Kebudayaan Nasional 2019

Ruang Keberagaman Ekspresi Budaya Tradisional Hingga Modern

Terciptanya sebuah ruang interaksi bersama antarmasyarakat dari berbagai unsur kebudayaan menjadi oasis di tengah kondisi bangsa Indonesia terkini. Melalui semangat Ruang Bersama “Indonesia Bahagia”, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan menyelenggarakan Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) yang diselenggarakan di Istora Senayan dan Parkir Selatan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, 7 sampai dengan 13 Oktober 2019.

SELAMA PERHELATAN PKN, Istora Senayan dan Parkir Selatan GBK disulap menjadi area dengan nuansa kebudayaan nusantara dan terbagi dalam sembilan area utama sesuai peruntukannya masing-masing, yakni area kuliner, panggung Kaebauk, panggung utama, panggung guyub, area konferensi, bazaar dan mural, area kompetisi permainan tradisional, dan panggung Siger.

Aktivitas utama yang digelar meliputi kompetisi daerah, kompetisi seni khas dari setiap provinsi di Indonesia, kompetisi nasional, kompetisi permainan tradisional yang dilaksanakan secara berjenjang, dari desa hingga ibukota, Konferensi Pemajuan Kebudayaan, ruang pencerahan





Pengunjung PKN dapat mengambil bagian dalam Kompetisi Permainan Tradisional, Passangiri, di Parkir Selatan GBK. Kompetisi permainan rakyat digelar berbasis pada objek Pemajuan Kebudayaan dari daerah hingga pusat dan berfokus pada kesederhanaan peralatan serta fasilitas.

publik yang bertujuan untuk mempersiapkan perencanaan pembangunan berbasis kebudayaan, ekshibisi kebudayaan, pameran artefak-artefak kebudayaan dan purwarupa teknologi pemajuan kebudayaan hasil inovasi dari Kemah Budaya Kaum Muda, serta karya-karya unggulan dari kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

Tidak ketinggalan, karya budaya bangsa pun ditampilkan di PKN. Beberapa pertunjukan seni yang ditampilkan meliputi defile tarian



FOTO-FOTO: DOK. DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

tradisional, koreografi bela diri, hingga rampak perkusi nusantara. Parade seni nusantara ini menggalang partisipasi dari pelaku budaya se-Indonesia. Para pelaku budaya merupakan utusan 34 provinsi yang terdiri dari seniman tradisi dan kultur urban.

Artis, seniman, dan tokoh yang terlibat dalam PKN, antara lain Didik Ninik Thowok, Rahayu Supanggah, Ki Manteb Sudharsono, Najwa Shihab, Cak Lontong, Didi Kempot, Barasuara, Jason Ranti, Navicula, Danilla Riyadi, Kunto Aji, NDX AKA, dan Ras Muhamad. Total ada seratus delapan pertunjukan digelar selama PKN berlangsung.

Pengunjung PKN tidak hanya dapat menikmati berbagai pertunjukan yang ada, namun juga mengambil bagian dalam Kompetisi Permainan Tradisional, Passanggiri, di Parkir Selatan GBK. Kompetisi permainan rakyat digelar berbasis pada objek Pemajuan Kebudayaan dari daerah hingga pusat dan berfokus pada kesederhanaan peralatan serta fasilitas. Permainan yang digelar yakni Gobak Sodor, Terompah Panjang, Egrang, dan Lari Balok. Melalui kompetisi permainan tradisional ini diharapkan masyarakat kembali melihat dan tertarik untuk melestarikan

permainan rakyat tersebut.

Tidak kalah menarik dari PKN adalah keberadaan pameran yang menampilkan kekayaan budaya dari 34 provinsi, Wastra Nusantara, Warisan Budaya Takbenda, Warisan Dunia, Kultur Perkayuan, Capaian Pemajuan Kebudayaan Seni Rupa, Empat Desa Percontohan Pemajuan Kebudayaan, dan Wayang Daun. Pameran dikemas dengan platform terbuka sehingga mampu mengakomodasi seluruh capaian artistik dari para peserta pameran. Untuk itu, Direktorat Kebudayaan melibatkan seniman rupa, Alit Ambara sebagai kurator artistik PKN.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PKN, diselenggarakan pula International Forum for The Advancement of Culture (IFAC), yang berlangsung pada 10 sampai dengan 13 Oktober 2019. IFAC merupakan forum internasional yang bersifat *people-to-people* dalam memperkuat upaya global untuk mengarusutamakan kebudayaan dengan penekanan khusus pada dampak kebudayaan terhadap kebahagiaan (*well-being*).

Konferensi perdana IFAC terdiri dari dua sesi pembicara inspiratif, gelar

PKN juga menggelar pameran yang menampilkan kekayaan budaya dari 34 provinsi, di antaranya Wastra Nusantara, Warisan Budaya Takbenda, dan Warisan Dunia, yang dikemas dengan platform terbuka sehingga mampu mengakomodasi seluruh capaian artistik dari para peserta pameran.

wicara dan diskusi panel yang bertujuan untuk memeriksa praktik baik di berbagai negeri di dunia, memetakan para aktor dan pemangku kepentingan, serta menciptakan agenda bersama dan rencana kerja untuk lima tahun mendatang.

Selain IFAC, berbagai konferensi dengan topik menarik pun digelar setiap hari selama PKN berlangsung, yakni konferensi Pengetahuan Tradisional, Florikultura, Ekonomi Budaya, Asal-usul DNA, Ekologi, Ento Astronomi, Etno Botani, dan Ketahanan Pangan.

Dimulainya Pekan Kebudayaan Nasional ditandai dengan Pawai Budaya “Parade Digdaya Nusantara” yang dikomandani oleh koreografer ternama Indonesia, Denny Malik. Pawai budaya diikuti sepuluh ribu peserta yang terdiri dari 640 peserta program Gerakan Seniman Masuk Sekolah, 200 penari Indonesia Permai, dan ribuan peserta dari 25 provinsi. Pawai menampilkan Ritus Nyawiji, Suara Anak Bangsa

dan Rampak Nusantara serta variasi baris-berbaris.

Para peserta berpawai mulai dari gedung DPR/MPR RI, menuju jalan Asia Afrika dan kemudian berlanjut menuju kompleks kantor Kemendikbud dengan total perjalanan sejauh 3,2 kilometer. “Ini adalah kesempatan kita untuk mewujudkan kedigdayaan kita dalam kebudayaan. Masing-masing kelompok akan menampilkan kolaborasi dengan iringan musik tradisi,” ujar Denny Malik.

Penyelenggaraan PKN melibatkan tiga ratus orang relawan yang berasal dari berbagai daerah. Mereka terdiri dari kaum muda usia 20 sampai dengan 28 tahun yang telah lulus seleksi yang diadakan oleh Direktorat Kebudayaan. Keterlibatan generasi muda ini diharapkan dapat menjadi penanda bagi lahirnya ide baru dan semangat dalam memajukan kebudayaan. Partisipasi masyarakat, khususnya para generasi muda sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia bahagia. **(PPS, diolah sumber Direktorat Jenderal Kebudayaan)**



Pengaruh PISA dalam Perubahan Kurikulum Pendidikan Indonesia

Dalam hasil asesmen PISA (*Programme for International Student Assessment*), Indonesia dinilai belum berhasil dalam memberikan sistem pendidikan yang tepat di mata dunia. Indonesia merasa perlu untuk mengubah kebijakan kurikulum agar meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat meningkatkan skor PISA. Mengapa demikian? Yuk, simak kajian berikut ini!

Oleh:

Indah Pratiwi

Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PISA ADALAH studi internasional tentang prestasi literasi membaca, matematika, dan sains siswa. Program ini diinisiasi oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) sejak tahun 2000. Subjek asesmen PISA terdiri atas tes literasi dasar dalam bidang membaca, matematika, dan sains tanpa melihat pada kurikulum nasional, yang diujikan kepada siswa yang berusia 15 tahun melalui *random sampling*.

PISA diselenggarakan untuk membantu negara-negara dalam mempersiapkan sumber daya manusia agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang diharapkan dalam pasar internasional. Setiap tiga tahun PISA mengeluarkan hasil asesmennya. Hasil asesmen ini dianggap mencerminkan kualitas pendidikan negara tersebut.

Jika hasilnya baik dan negara tersebut mampu berada di level atas dalam indeks capaian maka dianggap sebagai negara yang memiliki standar pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional. Sebaliknya, jika negara tersebut memperoleh hasil di bawah rata-rata dan menempati level bawah dalam indeks PISA maka dianggap memiliki kualitas pendidikan di bawah standar kebutuhan pasar global dan dituntut untuk

segera membenahi sistem pendidikan nasionalnya.

Sejak tahun 2000 Indonesia telah menjadi partisipan PISA. Namun selama 15 tahun hasil PISA Indonesia masih berada pada level bawah dibandingkan dengan negara partisipan lainnya. Hal ini terlihat dari capaian Indonesia pada tahun 2015 yang hanya berada pada peringkat 64 dari 69 negara partisipan (oecd.org, 2016).

Deretan angka merah yang dihasilkan Indonesia membuat pemerintah selalu mendapat tekanan publik karena dianggap belum berhasil dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Untuk itu, Indonesia merasa perlu mengubah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa dengan asumsi bahwa meningkatkan kualitas pendidikan akan sama dengan meningkatkan skor PISA.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan generasi yang siap dalam pasar internasional adalah dengan mengubah kurikulum. Tujuannya adalah agar Indonesia mampu menebus keteringgalan yang salah satunya dibuktikan melalui asesmen PISA.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana program PISA mempengaruhi perubahan kurikulum pendidikan Indonesia agar sejalan dengan sejumlah aspek yang diujikan dalam tes

tersebut? Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui keputusan kebijakan perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia yang sejalan dengan PISA.

Keterkaitan Indeks PISA dengan Kurikulum

Analisis penelitian yang dilakukan dalam kajian kualitatif ini adalah untuk menganalisis keterkaitan indeks PISA dengan kebijakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kajian ini mendeskripsikan bagaimana kebijakan kurikulum di Indonesia berubah seiring dengan rilis PISA setiap tiga tahun. Data diperoleh selama enam bulan melalui studi pustaka dari berbagai sumber literatur. Kajian studi pustaka ini dilakukan di Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Puslitjakdikbud Balitbang, Kemendikbud) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Cibinong. Penelitian dilakukan selama bulan Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019.

Data penelitian berasal dari jurnal atau hasil kajian sebelumnya untuk melihat bagaimana pengaruh PISA dalam mengubah sistem pendidikan di negara-negara partisipan. Data juga diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia di Kemendikbud untuk melihat perubahan arah kebijakan terutama sejak Indonesia tergabung menjadi negara partisipan PISA. Selain itu, ditelusuri juga data yang bersumber dari pemberitaan media massa nasional, untuk memperkuat deskripsi mengenai proses perubahan sistem pendidikan di Indonesia serta melihat bagaimana publik mempengaruhi kebijakan kurikulum di Indonesia.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara. Pertama, membandingkan berbagai perubahan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh negara-negara partisipan PISA dengan apa yang terjadi di

Indonesia. Kedua, membandingkan berbagai kebijakan kurikulum di Indonesia sebelum dan setelah tergabung dalam negara partisipan PISA.

Hasil PISA akan menunjukkan dua hal, yaitu: 1) capaian skor seluruh negara partisipan; 2) peringkat yang diperoleh dengan membandingkan capaian skor antarnegara. Karena capaian Indonesia selama 15 tahun bergabung menjadi partisipan PISA selalu berada di level bawah, kualitas pendidikan Indonesia dianggap masih sangat rendah jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan negara-negara partisipan lainnya.

Dorongan internal yang berasal dari pemberitaan media tentang capaian PISA Indonesia, sekaligus mengkritik kurikulum yang dianggap gagal, membuat Indonesia merasa perlu mengubah kurikulum agar sejalan dengan PISA. Hal ini terbukti dari: 1) PISA dijadikan acuan dalam rencana strategis (Renstra); 2) adanya perubahan kurikulum yang sejalan dengan PISA; dan 3) hasil evaluasi atas kurikulum menggunakan soal HOTS (*higher order thinking skill*) atau soal serupa dengan soal pengujian PISA.

Perubahan Kurikulum

PISA telah sukses mendorong perubahan kurikulum pendidikan secara nasional. Perubahan kurikulum pendidikan Indonesia rutin terjadi setelah hasil asesmen PISA terbit, yaitu: 1) Perubahan kurikulum pada tahun 2004, lebih memfokuskan kepada kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum berbasis kompetensi ini menekankan pada pengembangan kompetensi dan tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 2) Perubahan kurikulum pada tahun 2006 setelah enam tahun Indonesia menjadi partisipan PISA, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). KTSP memberikan kebebasan lebih kepada guru untuk merencanakan pembelajaran

Jika negara tersebut memperoleh hasil di bawah rata-rata dan menempati level bawah dalam indeks PISA maka dianggap memiliki kualitas pendidikan di bawah standar kebutuhan pasar global dan dituntut untuk segera membenahi sistem pendidikan nasionalnya.

sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah; 3) Kurikulum 2013 pendekatan pembelajaran ditekankan kepada kompetensi siswa sesuai dengan amanat yang disampaikan dalam PISA. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan faktor-faktor eksternal salah satunya adalah arus globalisasi dan rendahnya capaian nilai pendidikan Indonesia dalam TIMSS dan PISA.

Tidak hanya perubahan kurikulum, dalam merespons PISA kebijakan pendidikan Indonesia yang dilakukan yaitu memberikan muatan soal HOTS. Soal HOTS dirancang untuk berfikir aplikatif dalam pembelajarannya. Dengan ini diharapkan siswa mampu mengaplikasikan yang diketahui dan menjadi solusi bagi permasalahan di kehidupan sehari-hari. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy mengatakan secara tidak langsung bahwa penambahan nilai HOTS pada ujian nasional tahun 2018 merupakan respons Indonesia terkait dengan capaian PISA "...pembelajaran matematika Indonesia masih kurang tepat. Standar PISA menggunakan sistem pendidikan HOTS sementara Indonesia masih menggunakan LOTS sehingga tidak nyambung." (Rizal, 2018).

Sejumlah dokumen dan pernyataan Mendikbud terkait perubahan kurikulum membuktikan bahwa PISA memiliki pengaruh yang kuat dalam sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari konsekuensi logis dari bergabungnya Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*) yang menyetujui pendidikan Indonesia berbasis pasar. Akibatnya standar PISA juga konsekuensi yang harus dijalani Indonesia dalam rangka pemenuhan kebutuhan kompetensi di pasar internasional.

Dampak Bila Terlalu Berorientasi pada Capaian PISA

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa capaian PISA memberi andil pada perubahan kebijakan kurikulum di Indonesia. Namun beberapa kemungkinan dapat terjadi jika kebijakan pendidikan di Indonesia terlalu berorientasi pada capaian PISA.

Rasionalitas tentang PISA merupakan gambaran nyata tentang keterkaitan pendidikan dengan neoliberalisme, yaitu

PISA telah sukses mendorong perubahan kurikulum pendidikan secara nasional. Dalam merespons PISA, kebijakan pendidikan Indonesia tidak hanya melakukan perubahan kurikulum, tetapi juga memberikan muatan soal HOTS.

memiliki potensi adanya kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah (Boyum, 2014). Jika masih ada kesenjangan fasilitas dan kualitas pendidikan maka Indonesia akan terus menjadi objek yang tertindas oleh kekuatan pasar.

Kurikulum di Indonesia yang selalu berubah karena tuntutan pasar untuk menguasai keahlian tertentu membuat makna filosofis pendidikan tentang transformasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai budaya menjadi kehilangan makna. Penelitian ini menyarankan bahwa pada setiap perubahan kurikulum yang harus diperhatikan, juga mengenai kontekstualisasi Indonesia.

Ukuran keberhasilan siswa sebaiknya bukan dinilai dari hasil PISA semata karena PISA masih bias dengan budaya. Sesuai dengan amanat PISA bahwa pembelajaran harus mampu memberikan solusi bagi permasalahan siswa di kehidupannya sehari-hari. Penilaian pendidikan tidak bisa dilakukan secara seragam namun harus dilihat satu per satu masalah pada konteks pendidikan praktis yang beragam. (INT)

Ditulis ulang dari penelitian yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Volume 4, Nomor 1, 2019

Pembaca dapat membaca utuh penelitian di atas dengan memindai kode QR berikut.



Diftong dan Kluster Bahasa Indonesia

Jenis huruf dalam semua bahasa terbagi menjadi huruf vokal dan konsonan. Bahasa Indonesia mengenal adanya gabungan huruf vokal dan konsonan.

Gabungan huruf vokal disebut dengan *diftong*.

- Gabungan huruf vokal tersebut menghasilkan satu bunyi.
- Gabungan huruf diftong dapat diletakkan di posisi awal, tengah, dan akhir suatu kata.
- Dalam bahasa Indonesia terdapat empat diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal yaitu, *ai*, *au*, *ei*, dan *oi*.

Huruf Diftong	Posisi Awal	Posisi Tengah	Posisi Akhir
ai	<i>ai</i> eron	ba <i>ai</i> run <i>g</i>	pan <i>ai</i>
au	<i>au</i> todidak	taufik	harimau
ei	<i>ei</i> gendom	ge <i>ei</i> ser	survei
oi	-	bo <i>oi</i> kot	amboi

Adapun gabungan huruf konsonan disebut dengan kluster.

- Sama halnya dengan diftong, gabungan huruf konsonan menghasilkan satu bunyi serta dapat pula diletakkan di awal, tengah, dan akhir suatu kata.
- Gabungan huruf konsonan atau kluster terbagi menjadi kh, ng, ny, dan sy yang masing-masing jenisnya menghasilkan satu bunyi konsonan.

Gabungan Huruf Konsonan	Posisi Awal	Posisi Tengah	Posisi Akhir
kh	khusus	akhir	tarikh
ng	ngarai	bangun	senang
ny	nyata	banyak	-
sy	syarat	musyawarah	arasy

Sumber: Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.





Senarai Kata Serapan

BENTUK SERAPAN	BENTUK ASAL	ASAL BAHASA	ARTI KATA
takarir	takariir	Arab	Catatan yang dituliskan di tepi halaman kitab; terjemahan dialog pada film; keterangan yang menjelaskan isi gambar.
takjil	ajjala yu'ajjilu	Arab	Mempercepat atau menyegerakan dalam berbuka puasa dan juga bermakna untuk berbuka puasa.
mal	mall	Inggris	Gedung atau kelompok gedung yang berisi macam-macam toko dihubungkan oleh lorong (jalan penghubung).
kue	koe	Hokkian	Panganan yang dibuat dari bahan yang bermacam-macam, dapat dibuat dalam berbagai bentuk, ada yang dikukus, digoreng, dipanggang.
puisi	poesia	Portugis	Ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait.
swafoto	selfie	Inggris	Potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera ponsel atau kamera digital, biasanya untuk diunggah ke media sosial.
keik	cake	Inggris	Panganan yang biasanya terbuat dari adonan terigu, telur, gula, mentega dsb, dipanggang atau dikukus dalam loyang.
mekap	make up	Inggris	Tata rias muka.
skripsi	scriptie	Belanda	Karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya.
respons	respondeo	Latin	Tanggapan; reaksi; jawaban.

Jika Anda membutuhkan layanan informasi mengenai pendidikan dan kebudayaan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampaikan melalui kanal-kanal berikut:

Unit Layanan Terpadu (ULT)
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan



Telepon : 021 570 3303
 : 021 5790 3020
 : 0812 976 929
Faksimile : 021 573 3125
Laman : ult.kemdikbud.go.id

Alamat :
Gedung C Lantai 1
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,
Jakarta



Waktu Pelayanan

Pendaftaran : 08.00 – 11.00 WIB
Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB
Jumat : 09.00 – 15.30 WIB
Istirahat : 11.30 – 13.30 WIB



Unduh aplikasi

Majalah Jendela



Dapat dibaca juga melalui

<http://bit.ly/majalahjendela>

jendela.kemdikbud.go.id

kemdikbud.go.id

Majalah Jendela Dikbud





Selamat Memperingati

Bulan Bahasa dan Sastra 2019

"Maju Bahasa dan Sastra, Maju Indonesia"

Oktober 2019



ISSN: 2502-7867



9 772502 786065